

**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2019  
NOMOR : DIPA-013.03.2.409200/2019  
I A. INFORMASI KINERJA**

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum  
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA  
Kode>Nama Satker : (409200) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI

Kuasa Pengguna Anggaran : S O F Y A N  
Bendahara Pengeluaran : ASRIANI, SE,  
Pejabat Penanda tangan SPM : SISMOLO, S.Sos., M.M., M.Si.

Halaman : IA . 1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN		1.900.000.000
Sub Fungsi	03.03	PEMBINAAN HUKUM		1.900.000.000
2 Program	013.03.07	Program Administrasi Hukum Umum		1.900.000.000
Sasaran Program	01	Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang berkepastian hukum		
	02	Terwujudnya Otoritas Pusat yang efektif dan Tepat Sasaran		
Indikator Kinerja Program	01.01	Persentase Pemberian Layanan Administrasi Hukum Umum yang berkepastian Hukum	80 persen	
	02.01	Persentase Permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan Ekstradisi yang berhasil ditindaklanjuti	80 Persen	
Output Program	01	Layanan Administrasi Hukum Umum yang berkepastian Hukum		
Indikator Output Program	01	Jumlah Pemberian Layanan Administrasi Hukum Umum yang berkepastian Hukum	5311467 dokumen	
Kegiatan	5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah		1.900.000.000
Sasaran Kegiatan	01	Terwujudnya penyebaran informasi dan pelayanan pada program administrasi hukum umum di Kantor Wilayah yang efektif		
Indikator Kinerja Kegiatan	01.01	Indeks Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU		
	01.02	Persentase layanan program AHU di Kantor Wilayah yang diselesaikan		
Output Kegiatan	5251.001	Layanan Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah	1,00 Dokumen	731.792.000
	5251.001	Layanan Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah	13,00 Dokumen	731.792.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Dokumen Layanan Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah	429 dokumen	
Output Kegiatan	5251.002	Layanan MKNW, MPW dan MPD Notaris	1,00 bulan layanan	567.539.000
	5251.002	Layanan MKNW, MPW dan MPD Notaris	12,00 bulan layanan	567.539.000
Indikator Output Kegiatan	01	Terselenggaranya Majelis Kehormatan Wilayah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah Notaris	12 bulan layanan	
Output Kegiatan	5251.003	DUKUNGAN LAYANAN AHU DI WILAYAH	2,00 Dokumen	600.669.000
Indikator Output Kegiatan	01	terlaksananya dukungan pelaksanaan program Administrasi Hukum Umum di wilayah	48 dokumen	

Jakarta, 5 Desember 2018

Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
NIP 196909181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2019  
NOMOR : DIPA-013.03.2.409200/2019  
I B. SUMBER DANA**

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum  
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA  
Kode>Nama Satker : (409200) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI

Halaman I B. 1

						Pagu	Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2019	Rp.	1.900.000.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	0			(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	1.900.000.000		b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0			(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri		IDR	0		
6. SBSN	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR	0		
				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR	0		

2. Rincian Pinjaman / Hibah :

(Dalam Ribuan)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	RpLN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2019  
NOMOR : DIPA-013.03.2.409200/2019  
II. RINCIAN PENGELUARAN  
(RIBUAN RUPIAH)**

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum  
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA  
Kode / Nama Satker : (409200) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI  
Kewenangan : (KD)

Halaman II.1

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
409200	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI	-	1.900.000	-	-	-	1.900.000		
013.03.07	Program Administrasi Hukum Umum	-	1.900.000	-	-	-	1.900.000		
5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	-	1.900.000	-	-	-	1.900.000		
5251.001	Layanan Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah	-	731.792	-	-	-	731.792	20.51	
04	PNBP	-	731.792	-	-	-	731.792	060	
5251.002	Layanan MKNW, MPW dan MPD Notaris	-	567.539	-	-	-	567.539	20.51	
04	PNBP	-	567.539	-	-	-	567.539	060	
5251.003	DUKUNGAN LAYANAN AHU DI WILAYAH	-	600.669	-	-	-	600.669	20.51	
04	PNBP	-	600.669	-	-	-	600.669	060	
	<b>J U M L A H</b>	-	1.900.000	-	-	-	1.900.000		

Jakarta, 5 Desember 2018  
Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
NIP 196909181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2019  
NOMOR : DIPA-013.03.2.409200/2019  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum  
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA  
Kode dan Nama Satker : (409200) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI

Halaman : III.1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN DANA/PERKIRAAN PENERIMAAN												JUMLAH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	M E I	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	409200	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	65.427	546.325	96.520	131.495	125.575	76.304	82.506	162.850	175.979	325.680	111.339	1.900.000
		52 BELANJA BARANG	0	65.427	546.325	96.520	131.495	125.575	76.304	82.506	162.850	175.979	325.680	111.339	1.900.000
	013.03.07.5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah													
		52 BELANJA BARANG	0	65.427	546.325	96.520	131.495	125.575	76.304	82.506	162.850	175.979	325.680	111.339	1.900.000

Jakarta, 05 Desember 2018  
Pit. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
NIP 196909181994031001

**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2019  
NOMOR : DIPA-013.03.2.409200/2019  
IV. A B L O K I R**

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum  
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA  
Kode dan Nama Satker : (409200) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI

Halaman : IV A.1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	U R A I A N	KODE	U R A I A N

Jakarta, 05 Desember 2018  
Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.  
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
NIP 196909181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2019  
NOMOR : DIPA-013.03.2.409200/2019  
IV. B C A T A N**

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum  
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA  
Kode dan Nama Satker : (409200) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI

Halaman : IV B.1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	U R A I A N	KODE	U R A I A N

Jakarta, 05 Desember 2018  
Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.  
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
NIP 196909181994031001

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2019  
NOMOR : SP DIPA-013.03.2.409200/2019**

A. Dasar :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No. xxxx Tahun xxxx tentang APBN TA xxxx (2) dan perubahannya

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran :

1. Kementerian Negara / Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum
3. Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
4. Kode>Nama Satker : (409200) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI
- Sebesar : Rp. 1.900.000.000 ( SATU MILYAR SEMBILAN RATUS JUTA RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.03.07 Program Administrasi Hukum Umum  
013.03.07.5251 Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah

Jumlah Uang

Rp.	1.900.000.000
Rp.	1.900.000.000

C. Sumber Dana Berasal :

- |                                       |           |               |                                |     |   |
|---------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni                       | Rp.       | 0             | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB                                |           |               | - Pinjaman Dalam Negeri        | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan                      | Rp.       | 1.900.000.000 | - Hibah Dalam Negeri           | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri         | Rp.       | 0             | 5. Hibah Langsung              | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri                | Rp.       | 0             | - Hibah Luar Negeri Langsung   | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri                   | Rp.       | 0             | - Hibah Dalam Negeri Langsung  | Rp. | 0 |
| D. Pencairan dana dilakukan melalui : |           |               | 6. SBSN PBS                    | Rp. | 0 |
| 1. KPPN K E N D A R I                 | (060) Rp. | 1.900.000.000 |                                |     |   |

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. Petikan DIPA ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk Ditjen Administrasi Hukum Umum, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Petikan DIPA ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman (digital stamp) sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. Petikan DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang tertuang dalam Petikan DIPA sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara Petikan DIPA dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. Petikan DIPA ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2XXX sampai dengan 31 Desember 2XXX.

DS : 8277-4896-5870-3720

Jakarta, 05 Desember 2018  
A.N MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ASKOLANI  
NIP. 196606111992021001